BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Proses Pemuktahiran data adalah salah satu program Pemerintah dalam upaya mewujudkan Pendataan warga berdasarkan Nomor induk Kependudukan dan Kartu Keluarga (KK) , jumlah masyarakat tersusun dengan Nomor induk yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Pendataan tersebut sebagai data yang telah didatabasekan oleh Pemerintah setempat guna untuk Dokumentasi dan Arsip Pemerintah.

Setelah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL-PPM) di Desa Cibeusi kami dapat menarik kesimpulan yang dilakukan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi pembaca pada umumnya dan bagi para peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL-PPM) pada khususnya, adapun kesimpulan yang kami dapatkan antara lain:

1. Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang merupakan daerah yang sedang berkembang yang sebagian penduduknya masih kuat dalam keagamaannya.
2. Di Desa cibeusi, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang belum tersedianya pendidikan SMP dan SMA dan hanya satu tersedia SD Marga asih begitupun perguruan tinggi karena daerah yang sebagian besar persawahan dan perkebunan dan masih kurang jumlah home industry.
3. Desa Cibeusi masih kurang memperhatikan kesejahtraan guru agama sebagai pendidik anak-anak.
4. Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater Kabupaten Subang merupakan masyarakat yang peduli akan pendidikan formal wajib 9 tahun namun sebagian masarakatnya masih belum paham akan wajibnya pendidikan agama bagi anak.

5. Sarana dan prasarana cukup memadai untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN)
6. Respon masyarakat terhadap peserta KKN sangat baik dan mendukung dalam setiap kegiatan.
7. Sebagian besar kehidupan masyarakat cukup baik yang pada intinya masih banyak kegiatan gotong royong dalam menyelesaikan kegiatan yang bersifat umum dan keagamaan.
8. Sebagaim masyarakat Desa Cibeusi masih merasakan akan kepuasan kinerja pemerintahan dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyrakat.

5.2 Saran

Semoga Pemerintah dapat melakukan pemuktahiran data setiap 1(satu) tahun sekali agar jumlah dan pendataan masyarakat dapat diketahui secara rinci dan akurat, membentuk kader-kader desa lebih banyak lagi guna untuk mendata warga karena jumlah Pegawai/aparatur Desa yang terbatas demi meningkatkan pelayanan masyarakat agar tidak terganggu, masyarakat terbantu dalam segi Administrasi dan Identitas Kependudukannya.

Pemuktahiran data ini sebagai salah satu dasar Demokrasi untuk mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,masyarakat yang sudah wajib memilih dalam kegiatan politik wajib mengikuti jalannya Kegiatan Politik seperti Pemilu,Pilkada/Pilbup dan Pildes untuk terciptanya Pemilih-pemilih dengan data yang akurat dan akuntabel. Pemuktahiran data penting dalam mewujudkan kegitan politik sehingga harus di perhatikan pemerintah agar jalannya pesta Demokrasi penuh dengan kejujuran melalui data yang sudah di perbaharui pertahunnya.

Semoga dengan adanya Program KKL-PPM yang telah dilaksanankan oleh mahasiswa UNIKOM dengan kerjasama antara

Pemerintah Desa Cibeusi dan Universitas Komputer Indonesia dapat menjadi masukan positif bagi Pemerintah Desa Cibeusi maupun bagi Universitas kami dan Pemerintah Kabupaten Subang beserta masyarakatnya, pemuktahiran data dapat di teruskan kembali oleh elemen-elemen masyarakat guna membantu tugas Pemerintah dalam upaya pendatan masyarakat.

Saran kami sebagai Peserta KKN-PPM yang masih kurang pengalaman dalam Bidang kemasyarakatan semoga dapat dijadikan pengalaman. Dengan segala hormat dan kerendahan hati berikut ini kami mengemukakan beberapa saran-saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun saran-saran kami selaku peserta KKN-PPM adalah sebagia berikut:

1. Kami mengharapkan agar segala masalah yang kami temukan dimasyarakat agar menjadi bahan perbandingan untuk dijadikan rekomendasi kepada instansi yang terkait sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya di Desa Cibeusi dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya dan sebagaimana mestinya.
2. Hendaknya pemerintah tidak hanya mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan wajar diknas 9 tahun, tetapi juga pemerintah harus mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan keagamaan bagi anak remaja dan pemuda guna menciptakan lingkungan yang agamis.
3. Hendaknya hubungan antara pemerintah dan masyarakat terjalin akrab sehingga masyarakat mengetahui semua keputusan dan kebijakan yang di ambil pemerintah.
4. Agar Pemerintah Pusat dan daerah bisa memberikan solusi dan bantuan kepada masarakat diharapkan dapat terjun langsung kelapangan guna melihat kekurangan ataupun kendala yang di hadapi pemerintah terhadap masalah Pedesaan.